
PENGARUH VARIABEL *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA APARATUR

Hatta Putra Pratama¹⁾, *Alwin Teniro²⁾, Muhsin Efendi³⁾, Zainudin⁴⁾, Nanda
Zunafriesma⁵⁾

^{1,2,3,5)} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia

⁴⁾ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia

*Email Korespondensi: alwintenioug@gmail.com

Diterima Redaksi: 21-02-2024 / Selesai Revisi: 18-03-2024 / Diterbitkan Online: 29-04-2024

Abstrak

Tujuan Penelitian ini memperoleh data serta mengukur pengaruh *good governance* terhadap kinerja aparatur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan uji statistik. Adapun sampel dalam penelitian adalah seluruh ASN Kecamatan Bukit sebesar 24 Responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Sedangkan secara simultan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur”

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Demokrasi; Aturan Hukum; Kinerja Aparatur

Abstract

Purpose This study obtained data and measured the effect of good governance on apparatus performance. This research method uses quantitative methods with a statistical test approach. The sample in the study was all ASN Bukit District amounting to 24 respondents. The data analysis techniques used are multiple regression analysis, coefficient of determination, t test, and F test. The results showed that partially, accountability, transparency, democracy, and the rule of law had a positive and significant effect on apparatus performance, while simultaneously good governance had a positive and significant effect on apparatus performance”

Keywords: *Accountability; Transparency; Democracy; Rule of Law, Apparatus Performance*

PENDAHULUAN

Good governance dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata "*governance*" adalah sebuah konsep yang menggantikan istilah "*government*", *governance* adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat sipil menentukan sebuah kebijakan yang sangat penting karena pemerintah dan masyarakat sipil berinteraksi satu sama lain melalui kesepakatan, prosedur, dan perjanjian. Selain itu, masyarakat sipil harus memantau sekaligus mengontrol bagaimana kebijakan dibuat dengan melibatkan dua pihak.

Iniasi *good governance* di Indonesia dimulai pada awal reformasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh pemerintahan. Dapat dipahami bahwa isu yang ada saat ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bekerja secara memadai, antara lain adanya agenda politik, kurangnya integritas pejabat, dan kurangnya sumber daya yang berkualitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* penting untuk menentukan kualitas kinerja aparatur. Kinerja yang baik tercermin dari berbagai faktor, salah satunya *good governance*. Kinerja yang buruk di sisi lain, tanda dari kurangnya prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)", Memastikan penilaian yang obyektif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tujuan dari penilaian kinerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kantor Kecamatan Bukit untuk melakukan penilaian kinerja untuk menentukan apa yang merupakan "level of performance" yang tinggi bagi seorang karyawan dan sebaliknya dalam hal produktivitas kerja.

Beberapa permasalahan terkait kinerja aparatur Kecamatan Bukit yaitu masuk kantor terlambat dan aparatur meninggalkan tempat kerja dengan alasan yang tidak jelas, inisiatif masih kurang optimal seperti para aparatur harusnya menguasai perangkat digital dan tetap bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, para aparatur yang sering bolak-balik atau mengobrol sehingga cenderung membuang waktu kerja dan para aparatur sering berperilaku semaunya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh *good governance* di Kantor Kecamatan Bukit yang kurang baik,

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep "good governance" belum diterapkan sebaik mungkin; ada sejumlah indikator, termasuk keadilan, efektivitas, dan transparansi, yang belum diterapkan dengan benar (Ismayanti, 2021). Temuan pengujian menunjukkan bahwa kinerja meningkat secara signifikan oleh karakteristik independensi dan akuntabilitas. Sementara itu, kinerja tidak dipengaruhi oleh variabel keadilan dan transparansi (Ardhiarisca, 2012).

Pemerintah berperan sebagai "agent of change" utama bagi masyarakat di negara berkembang, dan "good governance" merupakan salah satu bentuk administrasi pembangunan (Ismayanti, 2021). Frasa "*good governance*" memiliki arti sebagai berikut dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Prinsip-prinsip yang mendukung kehendak rakyat dan yang dapat memberdayakan rakyat untuk mewujudkan impian mereka akan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan tujuan-tujuan nasional dan negara lainnya.
2. Gambaran realistis tentang pemerintahan yang bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif.

Dapat disimpulkan *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan prinsip-prinsip tertentu dalam setiap pengambilan keputusannya untuk mencapai tujuan nasional, efektivitas tata kelola pemerintahan melibatkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

Tujuan pelaksanaan *good governance* yaitu mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, budaya hukum untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing di tingkat regional dan dunia (Khairudin et al., 2021). Menurut *United Nationals Development Programme* prinsip *good governance* dalam (Mardiasmo, 2021) sebagai berikut:

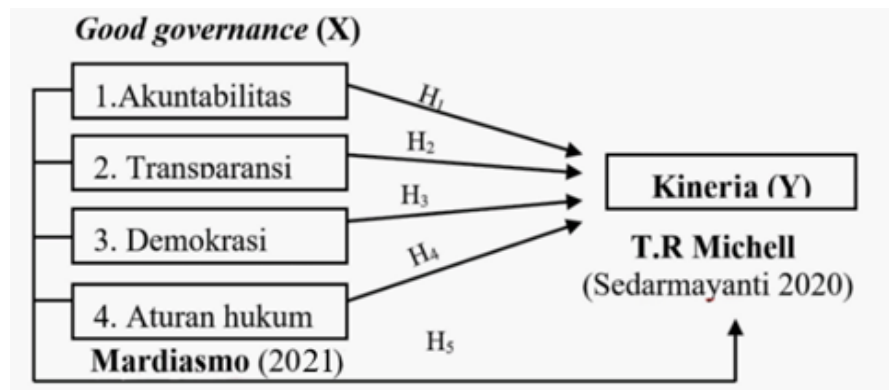
1. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi yaitu kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung bagi mereka yang membutuhkan.
3. Demokrasi, mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.
4. Aturan Hukum yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keempat prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan aturan hukum (Mardiasmo, 2021). Untuk mengatur Indikator Kinerja, Widodo, di sisi lain, mendefinisikan kinerja sebagai pelaksanaan tugas dan menyempurnakannya sesuai dengan kewajiban. Gibson berpendapat bahwa kapasitas dan dorongan seseorang untuk menyelesaikan tugas berdampak pada seberapa baik kinerja mereka (Mukarom & Laksana, 2016). Menurut Budiyanto dan Mochamad (2020), tujuan kinerja adalah menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan organisasi. (Nurfitriani, 2022) memberikan enam ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas (mutu) yaitu pengukuran kinerja berdasarkan mutu hasil sebuah pekerjaan.
- b. Kuantitas (jumlah) yaitu pengukuran kinerja berdasarkan jumlah hasil sebuah pekerjaan.
- c. Jangka waktu, yang mengukur kinerja dengan membandingkannya dengan tanggal jatuh tempo tugas.
- d. Penekanan pada biaya, yaitu jumlah yang dihabiskan untuk setiap tindakan sebelum penyelesaiannya.
- e. Pengawasan, atau pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.
- f. Hubungan antar pegawai yaitu penilaian kinerja secara kerjasama antar pegawai.

Dari 6 indikator tersebut, T.R. Mitchell (1978) menyatakan dalam (Sedarmayanti, 2020) bahwa indikator kinerja terdiri dari lima elemen secara spesifik: “*Quality of Work* (Kualitas Kerja), *Promptness* (Ketepatan Waktu), *Initiative* (Inisiatif), *Capability* (kemampuan), dan *Communication* (komunikasi).”

KERANGKA KONSEPTUAL**Gambar 1 Model Penelitian**

Sumber Gambar: Data Primer

HEPOTESIS

"*Good governance*" berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pada Kantor Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah" adalah hipotesis penelitian. Hipotesis verbal dan substantif ini menyatakan bahwa jika $H_0: \rho < 0$ menunjukkan tidak ada dampak dari tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja aparatur, maka $H_a: \rho \geq 0$ menunjukkan adanya dampak. Hipotesis berbasis deskripsi berikut ini memandu penelitian ini:

1. Diyakini bahwa akuntabilitas mempengaruhi seberapa baik kinerja peralatan di Distrik Bukit.
2. Diyakini bahwa transparansi mempengaruhi kinerja aparatur di Distrik Bukit.
3. Ada kemungkinan bahwa kinerja aparatur di Kecamatan Bukit dipengaruhi oleh demokrasi.
4. Diduga bahwa efektivitas aparatur Kecamatan Bukit dipengaruhi oleh supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

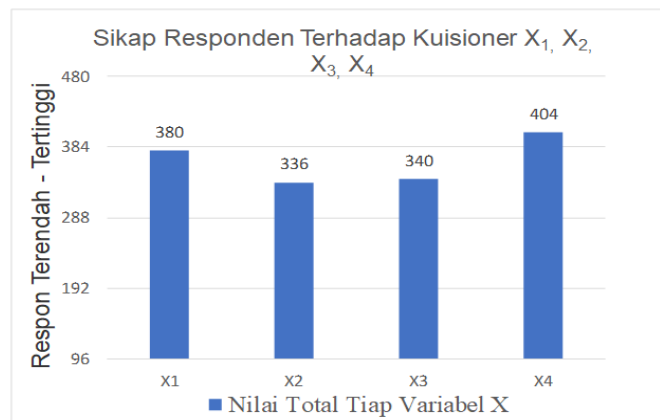
Sugiyono (2022) berpendapat bahwa metodologi penelitian adalah pendekatan terstruktur untuk pengumpulan data yang memiliki tujuan tertentu. Dalam metodologi tersebut, digunakan metode penelitian kuantitatif. Hardani (2020) berpendapat bahwa objek penelitian seperti populasi terdiri dari kejadian, orang, dan sumber data yang

memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu; di sisi lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi (Saragih et al., 2021). Sampel penelitian ini terdiri dari 24 orang ASN Kecamatan Bukit. Subjek penelitian yang memberikan data disebut sebagai sumber data (Saragih et al., 2021). Sumber data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang digunakan. Kuesioner berfungsi sebagai sumber data utama, dan LAKIP 2022 Kecamatan Bukit, RENJA, dan SKP berfungsi sebagai sumber sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, survei dengan menggunakan skala Likert, dan tinjauan literatur. Persamaan berikut ini digunakan untuk menentukan uji validitas, reliabilitas, dan regresi berganda dari teknik analisis data:

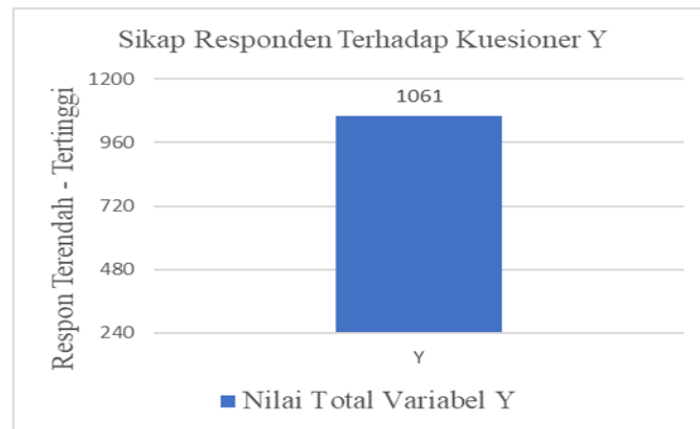
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4.$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap Responden Terhadap Variabel



Gambar 2 Sikap Responden Kuesioner Variabel X
Sumber: Data Primer



Gambar 3 Sikap Responden Kuesioner Variabel Y

Sumber: Data Primer Diolah 28 April 2023

Penyebaran kuesioner kepada 24 responden Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Bukit dengan menggunakan skala likert dalam 5 alternatif jawaban dengan skor terendah diberi bobot 1 hingga tertinggi diberi bobot 5 pada setiap pernyataan variabel. Dari Gambar 2, sikap responden terhadap variabel akuntabilitas (X_1) dengan skor 380, transparansi (X_2) dengan skor 336, demokrasi (X_3) dalam kategori cukup baik, Aturan Hukum (X_4) dalam sangat baik. Adapun untuk variabel Kinerja Aparatur (Y) dengan skor 1061 dalam kategori sangat baik.

Uji Validitas

Tabel. 1 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | R_{hitung} | R_{tabel} | Keputusan |
|-------------------------|------|--------------|-------------|-----------|
| Akuntabilitas (X_1) | 1 | 0,780 | 0,404 | Valid |
| | 2 | 0,581 | 0,404 | Valid |
| | 3 | 0,782 | 0,404 | Valid |
| | 4 | 0,645 | 0,404 | Valid |
| Transparansi (X_2) | 1 | 0,841 | 0,404 | Valid |
| | 2 | 0,756 | 0,404 | Valid |
| | 3 | 0,715 | 0,404 | Valid |
| | 4 | 0,547 | 0,404 | Valid |
| Demokrasi (X_3) | 1 | 0,773 | 0,404 | Valid |
| | 2 | 0,835 | 0,404 | Valid |
| | 3 | 0,782 | 0,404 | Valid |
| | 4 | 0,552 | 0,404 | Valid |
| Aturan Hukum (X_4) | 1 | 0,763 | 0,404 | Valid |
| | 2 | 0,749 | 0,404 | Valid |

| | | | | |
|----------------------|----|-------|-------|-------------|
| | 3 | 0,786 | 0,404 | Valid |
| | 4 | 0,854 | 0,404 | Valid |
| Kinerja Aparatur (Y) | 1 | 0,209 | 0,404 | Tidak Valid |
| | 2 | 0,479 | 0,404 | Valid |
| | 3 | 0,618 | 0,404 | Valid |
| | 4 | 0,494 | 0,404 | Valid |
| | 5 | 0,767 | 0,404 | Valid |
| | 6 | 0,719 | 0,404 | Valid |
| | 7 | 0,451 | 0,404 | Valid |
| | 8 | 0,604 | 0,404 | Valid |
| | 9 | 0,604 | 0,404 | Valid |
| | 10 | 0,491 | 0,404 | Valid |

Sumber: Data Primer 2024

Validitas merupakan penilaian ketepatan suatu instrumen pengukuran (Saragih et al., 2021). Pilihan dilakukan dengan menggunakan uji validitas Pearsons Product Moment dengan tingkat signifikansi 0,05 dan $n = 24$, menghasilkan r tabel = 0,404. Ketika r hitung melebihi r tabel, maka pertanyaan tersebut valid, dan sebaliknya. Semua item pernyataan untuk variabel-variabel berikut ini lolos uji validitas: akuntabilitas (X1), transparansi (X2), demokrasi (X3), dan supremasi hukum (X4). Untuk variabel kinerja aparatur (Y), hanya item pertama yang tidak valid dan perlu dihilangkan, sehingga tersisa sembilan item pernyataan yang valid.

Uji Reliabilitas

Tabel. 2 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Keputusan |
|------------------|------------------|--------------|-----------|
| Akuntabilitas | 0,622 | 0,60 | Reliabel |
| Transparansi | 0,688 | 0,60 | Reliabel |
| Demokrasi | 0,700 | 0,60 | Reliabel |
| Aturan Hukum | 0,668 | 0,60 | Reliabel |
| Kinerja Aparatur | 0,757 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: Data Primer 2024

Melakukan uji reliabilitas adalah langkah kedua dalam proses analisis; ini dilakukan setelah menyelesaikan uji validitas, yang menentukan apakah pernyataan kuesioner dianggap sah. Sebuah tes dianggap dapat dipercaya jika hasilnya secara umum konsisten dalam hal skor (Saragih et al., 2021). Reliabilitas didefinisikan sebagai konsistensi atau keakuratan pengukuran. Untuk menentukan reliabilitas, digunakan uji

Cronbach Alpha (α). Jika persyaratan pengujian melebihi 0,60, instrumen tersebut dapat diandalkan, dan sebaliknya. Setiap variabel diuji reliabilitasnya.

Uji Normalitas

Tabel. 3 Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 24 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .58904886 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .150 |
| | Positive | .150 |
| | Negative | -.115 |
| Test Statistic | | .150 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .172 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer 2024

Uji normalitas statistik Kolmogorov Smirnov dengan distribusi Asymptotic atau kurva normal probability plot dapat menemukan data yang terdistribusi normal dalam suatu penelitian. Wahjusaputri & Purwanto (2022) menyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal jika Sig. (2-tailed) > 0,05 dan sebaliknya. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 2-tailed pada Tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig. Tingkat signifikansi 2-tailed 0,172 > 0,05 menunjukkan distribusi residual yang teratur.

Uji Multikolinearitas

Tabel. 4 Uji Multikolinearitas dan Uji T Coefficients^a

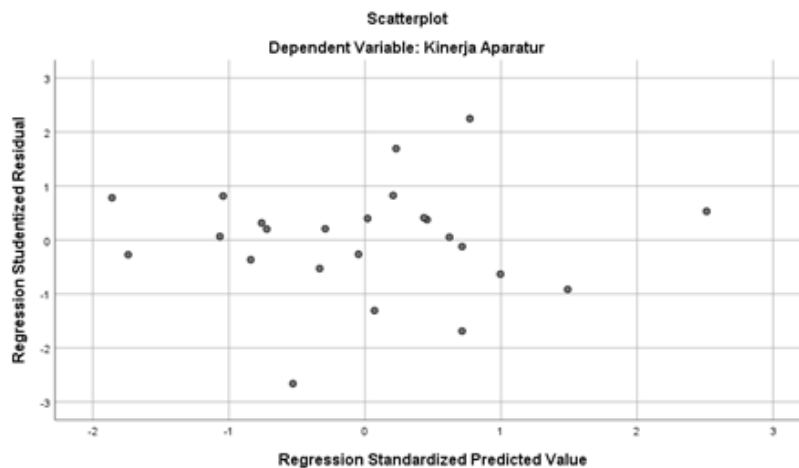
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22.547 | .983 | | 22.933 | .000 | | |
| | Akuntabilitas | .189 | .076 | .175 | 2.476 | .023 | .495 | 2.019 |
| | Transparansi | .381 | .131 | .355 | 2.900 | .009 | .164 | 6.085 |
| | Demokrasi | .272 | .125 | .244 | 2.184 | .042 | .197 | 5.076 |
| | Aturan Hukum | .328 | .109 | .300 | 2.994 | .007 | .245 | 4.089 |

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

Sumber: Data Primer 2024

Jika hubungan antara variabel independen terdeteksi oleh model regresi, multikolinearitas akan memeriksa hasilnya. Jika VIF kurang dari 10 dan toleransi kurang dari 0,10, maka multikolinearitas tidak menjadi masalah. Tidak ada multikolinearitas antar variabel model, sesuai dengan pengujian pada Tabel 4. Hal ini didukung oleh nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar. 4 Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 28 April 2023

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah ada ketidaksamaan residual antar pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas tidak diamati dalam penelitian yang baik. Heteroskedastisitas tidak ada jika titik-titik pada grafik plot antara residual variabel dependen dengan nilai yang telah diprediksikan menyebar dan tidak membentuk suatu pola (Purnomo, 2017). Penyebaran titik-titik secara acak dapat dilihat pada Gambar 4. Model regresi memprediksi kinerja aparatur dengan menggunakan akuntabilitas (X1), transparansi (X2), demokrasi (X3), dan supremasi hukum (X4). Heteroskedastisitas tidak ada.

Uji Linearitas

Tabel. 5 Hasil Uji Linearitas

| Variabel | Nilai Signifikansi <i>Linearity</i> | Keputusan |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Kinerja Aparatur* Akuntabilitas | 0,000 | Linier |
| Kinerja Aparatur* Transparansi | 0,000 | Linier |
| Kinerja Aparatur* Demokrasi | 0,000 | Linier |
| Kinerja Aparatur* Aturan Hukum | 0,000 | Linier |

Sumber: Data Primer 2024

Keadaan linier (lurus) distribusi data penelitian dapat dipastikan dengan menggunakan uji linieritas. Teknik regresi berganda dapat diterapkan pada data penelitian jika hasil temuan dari uji linieritas adalah linier. Berdasarkan nilai linearitas yang cukup besar $< 0,05$, Wahjusaputri dan Purwanto (2022) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan dependen. Uji linearitas pada Tabel 6 menunjukkan adanya hubungan yang linear ($0,000 < 0,05$) antara variabel independen dan dependen.

Uji T

Uji-t memungkinkan kita untuk mendasarkan keputusan kita secara parsial tentang bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan sebaliknya. Sebaliknya, H_a ditolak dan H_0 diterima jika signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel .6 Hasil Uji F
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22.547 | .983 | | 22.933 | .000 | | |
| | Akuntabilitas | .189 | .076 | .175 | 2.476 | .023 | .495 | 2.019 |
| | Transparansi | .381 | .131 | .355 | 2.900 | .009 | .164 | 6.085 |
| | Demokrasi | .272 | .125 | .244 | 2.184 | .042 | .197 | 5.076 |
| | Aturan Hukum | .328 | .109 | .300 | 2.994 | .007 | .245 | 4.089 |

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

Sumber: Data Primer 2024

Adapun hasil uji t dengan nilai t_{tabel} 2,093 diperoleh dari $t_{tabel} = t(a/2; n-k-1) = t(0.025; 19)$ sebagai berikut:

1. Tabel 4 menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) memiliki dampak yang baik terhadap kinerja aparat (Y), dimana H_a diterima dan H_o ditolak karena signifikansi $0,023 < 0,05$ dan nilai thitung $2,476 > t_{tabel} 2,093$.
2. Tabel 4 menggambarkan bagaimana transparansi (X2) mempengaruhi kinerja aparat (Y) secara parsial. H_a diterima dan H_o ditolak karena tingkat signifikansi $0,009$ di bawah $0,05$ dan nilai thitung sebesar $2,900$ lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar $2,093$.
3. Nilai thitung Tabel 4 sebesar $2,184$ lebih besar dari t_{tabel} sebesar $2,093$, dengan tingkat signifikansi $0,042/0,05$. Hasilnya, kita dapat menerima H_a dan menolak H_o . Kinerja aparatur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh demokrasi (X3) (Y).
4. Demokrasi (X3) pada Tabel 4 memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur (Y). Karena supremasi hukum merupakan faktor yang berkontribusi terhadap demokrasi (X3), maka kami menolak H_o dan menyimpulkan bahwa kinerja aparatur (Y) mendapat manfaat dari thitung $2.184 > t_{tabel} 2.093$ dan signifikansi $0.007 < 0.05$.

Uji F

Tabel. 7 Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 162.519 | 4 | 40.630 | 96.732 | .000 ^b |
| | Residual | 7.981 | 19 | .420 | | |
| | Total | 170.500 | 23 | | | |

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

b. Predictors: (Constant), Aturan Hukum, Akuntabilitas, Demokrasi, Transparansi

Uji F ini menunjukkan bagaimana variabel independen dan dependen berinteraksi. Kami menerima H_a dan menolak H_o jika ambang batas signifikansi kurang dari $0,05$, dan sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hasil uji F menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang kuat berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur ($F_{hitung} = f(k;n-k) = f(4;20)$) ($F_{hitung} 96.732 > F_{tabel} 2.87$ dan signifikansi $0.00 < 0.05$). Oleh karena itu, kami menerima H_a dan menolak H_o .

Tabel. 8 Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .976 ^a | .953 | .943 | .648 |

a. Predictors: (Constant), Aturan Hukum, Akuntabilitas, Demokrasi, Transparansi
 b. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

Sumber: Data Primer 2024

Analisis Persamaan Regresi Berganda

Persamaan regresi berganda diperiksa untuk memprediksi nilai variabel dependen secara parsial dan simultan dengan menggunakan nilai-nilai variabel independen. Dengan menggunakan koefisien dari tabel 4, kita bisa mendapatkan persamaan regresi berganda:

$$Y = 22.547 + 0,189X_1 + 0,381X_2 + 0,272X_3 + 0,328X_4$$

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta 22,547 artinya jika akuntabilitas (X₁), transparansi (X₂), demokrasi (X₃) serta aturan hukum (X₄) adalah 0 maka kinerja aparatur (Y) sebesar 22.547.
2. Setiap penambahan variabel akuntabilitas (X₁) sebesar 1, maka terjadi kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,189.
3. Setiap penambahan variabel transparansi (X₂) sebesar 1, maka terjadi kenaikan kinerja aparatur (Y) Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,381.
4. Setiap penambahan variabel demokrasi (X₃) sebesar 1, maka terjadi kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,272.
5. Setiap penambahan variabel aturan hukum (X₄) sebesar 1, maka terjadi kenaikan kinerja aparatur (Y) di Kantor Kecamatan Bukit sebesar 0,328.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi menghitung persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 7 menunjukkan nilai R² sebesar 95,3%, atau 0,953 R Square. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mempengaruhi variabel kinerja peralatan (Y) sebesar 95,3%, sedangkan faktor lain di luar variabel independen dapat mempengaruhi sebesar 4,7% (100%-95,3%).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Aparatur

Hipotesis pertama, yang diterima, menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik atau buruk mempengaruhi kinerja aparat, yang dinilai cukup baik di Kecamatan Bukit. Menurut hipotesis yang didukung oleh penelitian ini, Pemegang dana perwalian harus melaporkan semua tindakan dan kegiatan mereka kepada pemberi dana perwalian, yang dapat meminta pertanggungjawaban mereka (Mardiasmo, 2018).

Namun, pajak dan retribusi daerah telah menurun, yang menunjukkan hal sebaliknya. Studi ini memverifikasi temuan Nurwana dkk. (2020) dan Yuniarsih dkk. (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas meningkatkan kinerja peralatan. Namun, tidak demikian halnya dengan penelitian (Rachman, 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur

Diterimanya hipotesis kedua menunjukkan bahwa baik atau buruknya transparansi berdampak kepada baik atau buruknya kinerja aparatur di Kecamatan Bukit yang berkategori cukup baik. Terjadi peningkatan tahun ini, dimana pemerintah Kecamatan Bukit memanfaatkan media sosial dengan mempublikasikan segala program atau kegiatan. Studi ini mendukung gagasan bahwa kebebasan informasi adalah dasar dari keterbukaan (Mardiasmo, 2018). Temuan studi ini relevan dan sejalan dengan penelitian sebelumnya (Rachman, 2021) yang menunjukkan dampak substansial dan menguntungkan dari transparansi terhadap kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian (Nurwana et al., 2020) yang menunjukkan bahwa kinerja tidak dipengaruhi oleh transparansi.

Pengaruh Demokrasi Terhadap Kinerja Aparatur

Diterimanya hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa baik atau buruknya demokrasi berdampak kepada baik atau buruknya kinerja aparatur di kantor Kecamatan Bukit yang berkategori cukup baik. Pemerintah Kecamatan Bukit menegakkan demokrasi baik di internal maupun eksternal, upaya yang dilakukan dalam internal seperti para aparatur diberi kesempatan yang sama serta melibatkan para aparatur dalam diskusi, evaluasi, pengambilan keputusan secara musyawarah sedangkan dalam

eksternal dengan adanya kotak saran. Penelitian ini sejalan dengan teori bahwa demokrasi yaitu adanya partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum dengan cara aspiratif (Mardiasmo, 2021).

Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Kinerja Aparatur

Diterimanya hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa baik atau buruknya aturan hukum berdampak kepada baik atau buruknya kinerja aparatur di kantor Kecamatan Bukit yang berkategori sangat baik. Pemerintah Kecamatan Bukit telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku serta adanya pelaksanaan hukum ketika para aparatur melakukan kesalahan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang menunjukkan aturan hukum tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Yuniarsih dkk., 2021).

Pengaruh *Good governance* Terhadap Kinerja Aparatur

Berdasarkan uji F, *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Kecamatan Bukit sebesar 95,3% artinya hipotesis kelima diterima yang ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Secara empiris penelitian ini yaitu pertama, seorang aparatur dapat bekerja dengan optimal guna mencapai tujuan organisasi, kedua, *good governance* didasarkan pada landasan konseptual, secara empiris telah memberikan konsep yang baik kepada aparatur untuk mengembangkan sebuah organisasi publik serta mengefektifkan berbagai pelaksanaan kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *good governance* baik secara teoritik maupun empirik memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Kecamatan Bukit.

Studi ini mendukung temuan sebelumnya bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja (Saputro & Efendi, 2021; Rifdah dan Luterlean, 2021; Agustina et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji kinerja aparatur Kecamatan Bukit dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Persamaan regresi berganda, yang setelah dianalisis menghasilkan $Y = 22.547 + 0.189X_1 + 0.381X_2 + 0.272X_3 + 0.328X_4$, dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan berikut dari uji t dan uji F:

1. Aparatur Kantor Kecamatan Bukit meningkatkan akuntabilitas, yang ditunjukkan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,476 > 2,093$) dan nilai signifikan $0,023 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima karena dapat diterima.
2. Transparansi meningkatkan kinerja Kantor Distrik Bukit. Dengan menggunakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,900 > 2,093$) dan nilai signifikan $0,009 < 0,05$, H_a diterima sedangkan H_0 ditolak, menunjukkan kategori valid.
3. Aparatur Kantor Kecamatan Bukit berfungsi lebih baik di bawah demokrasi, yang ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,184 > 2,093$) dan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima.
4. Menerapkan supremasi hukum meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Bukit. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,994 > 2,093$) dan signifikansi $0,007 < 0,05$ menyiratkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kategori baik.
5. Peralatan kantor kecamatan Bukit berkinerja lebih baik, yang ditunjukkan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($96,732 > 2,87$) dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Variabel bebas berpengaruh sebesar 95,3%, sedangkan variabel tidak bebas berpengaruh sebesar 4,7%.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian ini menyarankan yaitu kelemahan yang masih ada yaitu pada indikator akuntabilitas terdapat indikator yang belum tercapai dan masih belum optimal dalam melakukan kerjanya terhadap publik.

REFERENSI

- Agustina, R., Sunarta, K., & Edi, S. (2021). *Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah*. <http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2334>.
- Budiyanto, E., & Mochamad, M. (2020). Kinerja Karyawan Ditinjau dari Aspek Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja. In *Evaluasi Kinerja SDM*. CV. AA Rizky.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif* (Nomor April). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ismayanti. (2021). *Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle*

- Kabupaten Enrekang (Vol. 14, Nomor 1).
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13352-Full_Text.pdf
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. CV. Amerta Media.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. CV. Pustaka Setia.
- Nurfitriani. (2022). *Manajemen Kinerja Karyawan*. Cendekia Publisher.
- Nurwana, Maryadi, & Saripuddin. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas, Responsivitas, Dan Keadilan Terhadap Kinerja Asn Pada Sekretariat Daerah Kota Parepare. *Jurnal Nmar*, 1(2), 284–294. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/1279>
- Praturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. In *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* (hal. 1–52).
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. CV. Wade Group.
- Rachman, A. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*. Program Pascasarjana Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia.
- Saputro, G., & Efendi, D. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal & Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Jurnal ilmu dan Riset Akutansi*, 10, 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4171>
- Saragih, M., Liharman, S., Purba, J. . P., & Panjaitan, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar – Dasar Memulai Penelitian* (Nomor iii). Yayasan Kita Menulis.
- Sedarmayanti. (2020). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. Alfabeta.
- Wahjusaputri, S., & Purwanto, A. (2022). *Statistika Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. CV. Bintang Semesta Media.
- Yuniarsih, W., Sulastini, & Khuzaini. (2021). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus Pada Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8884/>